

Krisis Spiritualitas Sebagai Akar Lemahnya Akuntabilitas Publik: Analisis Asumsi Dasar Dan Tujuan Laporan Keuangan Berdasarkan Kitab Amsal

¹Putra Hadiwinata, ²Ragriva Br Bangun, ³Ribka Melisa V Manullang, ⁴Nasirwan

¹Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Medan

²Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Medan

³Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Medan

⁴Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Medan

E-mail: ¹putrahadiwinata2002@gmail.com, ²ragrivabangun2004@gmail.com,
³manullang031@gmail.com, ⁴nasirwan@unimed.ac.id

ABSTRAK

Fenomena manipulasi laporan keuangan dan rendahnya akuntabilitas publik seringkali dipandang sebatas kegagalan sistem pengawasan atau lemahnya regulasi teknis. Namun, penelitian ini berargumen bahwa akar permasalahan sesungguhnya terletak pada dimensi spiritual, yaitu krisis pengenalan manusia akan Tuhan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hubungan manusia dengan Allah memengaruhi integritas dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan hikmat dari Kitab Amsal sebagai kerangka analisis. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis kualitatif deskriptif terhadap teks-teks hikmat dalam Kitab Amsal yang relevan dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Analisis dilakukan dengan meninjau kembali asumsi dasar akuntansi dan tujuan laporan keuangan melalui kacamata teologis. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketika manusia jauh dari Allah, terjadi pergeseran asumsi dasar dari "takut akan Tuhan" menjadi "pemujaan terhadap materi," yang memicu perilaku tidak etis. Berdasarkan Kitab Amsal, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar kewajiban profesional, melainkan bentuk penyembahan kepada Tuhan yang menuntut "batu timbangan yang tepat" (Amsal 11:1). Artikel ini menyimpulkan bahwa perbaikan akuntabilitas publik yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui penguatan sistem eksternal, melainkan harus dimulai dari restorasi spiritualitas individu. Penekanan utama diletakkan pada transformasi hati manusia sebagai agen pelapor agar laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kebenaran dan keadilan yang hakiki.

Kata Kunci : Spiritualitas; Akuntabilitas Publik; Laporan Keuangan; Kitab Amsal; Integritas.

ABSTRACT

The phenomenon of financial report manipulation and low public accountability is often viewed merely as a failure of oversight systems or weak technical regulations. However, this study argues that the true root of the problem lies in the spiritual dimension, namely the crisis of human recognition of God. This article aims to explore how the relationship between humans and God influences integrity in financial reporting by using wisdom from the Book of Proverbs as an analytical framework. The method used is a literature study with a descriptive qualitative analysis approach to wisdom texts in Proverbs that are relevant to honesty, justice, and responsibility. The analysis is carried out by re-examining the basic assumptions of accounting and the objectives of financial reporting through a theological lens. The results show that when humans are distant from God, there is a shift in the fundamental assumption from “fear of the Lord” to “worship of material,” which triggers unethical behavior. Based on Proverbs, transparency and accountability are not merely professional obligations but acts of worship to God that demand “accurate weights and measures” (Proverbs 11:1). This article concludes that sustainable improvement of public accountability cannot be achieved solely through strengthening external systems, but must begin with the restoration of individual spirituality. The main emphasis is placed on the transformation of the human heart as the reporting agent so that the resulting financial reports reflect true justice and truth.

Keywords : spirituality; Public Accountability; Financial Reporting; Book of Proverbs; Integrity.

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor publik yang baik. Secara konseptual, akuntabilitas bukan sekadar prosedur administratif, melainkan kewajiban moral bagi para pengelola sumber daya publik (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban yang transparan

kepada rakyat (prinsipal). Namun, dalam realitasnya, sektor publik masih sering diwarnai oleh berbagai praktik penyimpangan, seperti manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan anggaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan formal yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjamin terciptanya integritas yang kokoh di dalam tubuh birokrasi.

Upaya untuk mengatasi lemahnya akuntabilitas publik selama ini cenderung berfokus pada pendekatan teknokratis, seperti penguatan regulasi, audit internal, dan digitalisasi sistem pelaporan. Meskipun langkah-langkah tersebut penting, sering kali solusi teknis ini gagal menyentuh akar permasalahan yang paling mendasar. Masalah akuntabilitas seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya standar akuntansi, melainkan oleh faktor manusia di balik sistem tersebut. Adanya celah dalam sistem seringkali dimanfaatkan oleh individu yang mengalami krisis moral, yang menunjukkan bahwa ada dimensi yang lebih dalam dari sekadar kegagalan sistemik.

Penelitian ini berargumen bahwa akar dari lemahnya akuntabilitas publik adalah krisis spiritualitas. Spiritualitas dalam konteks profesionalitas tidak hanya dipahami sebagai ritual keagamaan, melainkan sebagai kesadaran mendalam akan keberadaan Tuhan yang memengaruhi setiap keputusan dan tindakan. Ketika seorang individu kehilangan orientasi spiritualnya, nilai-nilai etika seperti kejujuran dan tanggung jawab akan tergerus dan digantikan oleh pemujaan terhadap materi serta kepentingan pribadi. Krisis spiritualitas ini menyebabkan asumsi dasar dalam bertindak tidak lagi berlandaskan pada kebenaran, melainkan pada kemanfaatan pragmatis yang merugikan publik.

Kitab Amsal dalam tradisi hikmat biblika menawarkan perspektif yang relevan untuk membedah krisis ini. Salah satu prinsip sentral dalam

Amsal adalah "*takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan*" (Amsal 1:7). Jika prinsip ini ditarik ke dalam ranah akuntansi, maka integritas dalam menyusun laporan keuangan seharusnya lahir dari kesadaran bahwa Tuhan adalah saksi utama atas setiap angka yang disajikan. Kitab Amsal secara tegas mengutuk penggunaan "neraca serong" atau timbangan yang tidak akurat, yang dalam konteks modern dapat dianalogikan sebagai laporan keuangan yang menyesatkan atau tidak mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya.

Melalui analisis asumsi dasar akuntansi dan tujuan laporan keuangan, penelitian ini mencoba merekonstruksi makna akuntabilitas melalui kacamata teologis. Asumsi *going concern* atau entitas ekonomi dalam akuntansi seringkali dipandang hanya dari sudut pandang materi dan keberlangsungan bisnis. Namun, berdasarkan hikmat Amsal, asumsi dasar seharusnya mencakup tanggung jawab penatalayanan (*stewardship*) di mana manusia hanyalah pengelola sementara atas milik Tuhan. Dengan demikian, tujuan laporan keuangan bukan hanya untuk memenuhi syarat formalitas, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Sang Pencipta dan horizontal kepada sesama manusia.

Novelty atau kebaruan dari artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas dari teks kuno Kitab Amsal ke dalam diskursus akuntansi

sektor publik kontemporer. Saat penelitian lain lebih banyak membahas akuntabilitas dari sisi budaya organisasi atau kepemimpinan sekuler, penelitian ini menyoroti bahwa restorasi akuntabilitas harus dimulai dari transformasi hati dan spiritualitas individu. Dengan meninjau kembali fondasi moral para akuntan dan birokrat, diharapkan tercipta sebuah sistem pelaporan keuangan yang tidak hanya akurat secara angka, tetapi juga benar secara hakiki dan berorientasi pada keadilan publik.

2. LANDASAN TEORI

Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik didefinisikan sebagai kewajiban instansi sektor publik untuk melaporkan pemanfaatan sumber daya dan realisasi kebijakan kepada masyarakat selaku pemberi mandat. Selain harus patuh pada aturan hukum, aspek ini juga membawa beban moral dalam menjaga kepercayaan publik. Pada tataran pemerintahan, akuntabilitas tersebut ditunjukkan melalui

penyusunan laporan keuangan yang transparan, relevan, serta dapat diandalkan, yang nantinya berfungsi sebagai instrumen bagi masyarakat untuk menilai kinerja anggaran negara.

Berdasarkan pandangan Kurniawati dan Sadeli (2021), akuntabilitas publik dipahami sebagai keharusan bagi pihak penyelenggara pemerintahan untuk memaparkan sekaligus mempertanggungjawabkan tiap kegiatan dan capaian kinerja mereka kepada publik. Atas dasar fungsi tersebut, akuntabilitas memegang peranan krusial sebagai salah satu pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Teori Laporan Keuangan Sektor Publik

Pemerintah menggunakan laporan keuangan sektor publik sebagai media untuk mempertanggungjawabkan tata kelola dana masyarakat. Penyusunan laporan ini utamanya bertujuan untuk mengomunikasikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja, serta alokasi sumber daya ekonomi entitas terkait. Dengan informasi yang jelas, pihak-pihak berkepentingan dapat

memanfaatkannya untuk menilai kinerja sekaligus mengambil keputusan strategis.

Merujuk pada pandangan Hery (2015), laporan keuangan berperan sebagai sarana informasi sekaligus bentuk pertanggungjawaban yang merefleksikan kondisi finansial suatu organisasi. Pada ranah sektor publik, urgensi fungsi tersebut menjadi jauh lebih krusial lantaran erat kaitannya dengan transparansi alokasi dan pemanfaatan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki karakteristik kualitatif tertentu agar informasi yang disajikan bermanfaat bagi pengguna.

Karakteristik tersebut meliputi:

- Relevan
- Andal (reliable)
- Dapat dibandingkan
- Dapat dipahami
- Jujur dan netral dalam penyajian

Karakteristik ini memastikan informasi keuangan dapat digunakan secara optimal dalam menilai akuntabilitas serta mengambil

keputusan. Apabila kualitas tersebut tidak terpenuhi, laporan keuangan akan kehilangan esensinya, yang pada akhirnya dapat memicu penurunan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Teori Transparansi

Prinsip keterbukaan dalam mendistribusikan informasi kepada pihak-pihak yang relevan dikenal sebagai transparansi. Terkait konteks organisasi publik, hal ini menuntut pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dengan akses yang mudah terhadap laporan keuangan yang tidak hanya lengkap, tetapi juga akurat.

Akuntabilitas dan transparansi saling berkaitan erat karena adanya akses informasi yang terbuka memberikan keleluasaan bagi publik untuk memantau pengelolaan dana atau aset negara. Implikasinya, ketika sebuah instansi pemerintah semakin transparan, maka kredibilitas dan rasa percaya masyarakat terhadap instansi tersebut juga akan semakin meningkat.

Teori Standar Akuntansi Sektor Publik

Standar Akuntansi Sektor Publik (SASP) berfungsi sebagai regulasi

baku dalam mengonstruksi laporan keuangan pemerintah, dengan tujuan menjamin kualitas serta daya banding informasi yang disajikan. Implementasi standar akuntansi yang kesat dan relevan ini berkontribusi signifikan dalam mempromosikan transparansi, memperkokoh akuntabilitas, serta memajukan mutu pelaporan keuangan secara menyeluruh.

Selain itu, standar ini berperan sebagai instrumen pengendalian untuk menjamin bahwa penyusunan laporan keuangan senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum dan merefleksikan kondisi riil organisasi tanpa adanya distorsi.

Teori Spiritualitas dalam Akuntansi

Spiritualitas direfleksikan sebagai kesadaran personal atas nilai-nilai moral, etika, serta transendensi (hubungan dengan Tuhan) yang mengarahkan perilaku individu dalam kesehariannya, tidak terkecuali dalam ranah profesi akuntansi. Dimensi spiritual ini menjadi motor penggerak bagi seorang profesional untuk senantiasa mengedepankan kejujuran,

tanggung jawab, dan integritas tinggi saat mengemban tugasnya.

Aturan dan standar formal dalam akuntansi sektor publik memerlukan spiritualitas sebagai fondasi moral pelengkapannya. Ketika dimensi spiritualitas ini rapuh, risiko terjadinya fraud seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, dan merosotnya akuntabilitas publik akan semakin besar. Namun, jika spiritualitas seseorang kuat, hal tersebut akan membentengi diri dengan integritas serta kejujuran dalam setiap proses pelaporan keuangan.

Teori Integritas dan Etika Profesi

Integritas dimaknai sebagai dedikasi individu untuk senantiasa bersikap jujur, selaras antara perkataan dan perbuatan (konsisten), serta bertanggung jawab pada setiap keputusannya. Di dalam profesi akuntansi, prinsip ini menempati posisi fundamental yang wajib diinternalisasi oleh setiap praktisi, mengingat laporan keuangan yang mereka susun menjadi basis utama bagi berbagai pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan strategis.

Etika profesi menuntut para akuntan untuk memprioritaskan kemaslahatan publik, mempertahankan objektivitas, serta menjauhkan diri dari segala tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain. Melalui internalisasi etika dan integritas yang kokoh, laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki tingkat keandalan yang tinggi sehingga dapat diandalkan sepenuhnya oleh masyarakat.

Perspektif Kitab Amsal tentang Akuntabilitas dan Kejujuran

Kitab Amsal mengajarkan nilai-nilai hikmat yang berkaitan dengan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip akuntansi modern.

Amsal 11:1 menegaskan bahwa “neraca yang serong adalah kekejian bagi Tuhan”, yang menunjukkan pentingnya kejujuran dalam pengukuran dan pelaporan.

Amsal 12:22 mengajarkan pentingnya kesetiaan dan kejujuran dalam setiap tindakan.

Amsal 16:11 menekankan objektivitas dan ketepatan dalam pengukuran, yang sejalan dengan prinsip objektivitas dalam akuntansi.

Amsal 21:3 menjelaskan bahwa melakukan kebenaran dan keadilan lebih penting daripada sekadar memenuhi formalitas, sehingga akuntabilitas harus dipahami sebagai tanggung jawab moral, bukan hanya kewajiban administratif.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis untuk mengeksplorasi fenomena krisis spiritualitas dalam praktik akuntabilitas publik secara mendalam. Strategi yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan mengintegrasikan dua rumpun sumber data. Sumber primer berasal dari ekseseptis teks-teks Kitab Amsal yang bertema kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab (seperti konsep "neraca yang serong" dan "takut akan Tuhan"), sedangkan sumber sekunder mencakup jurnal akuntansi sektor publik, standar pelaporan keuangan, serta artikel etika bisnis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur secara simultan terhadap

regulasi akuntansi modern dan ayat-ayat kunci Kitab Amsal. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan hermeneutika untuk menangkap makna teks hikmat dan mengontekstualisasikannya ke dalam tantangan akuntansi kontemporer. Proses analisis ini bergerak sistematis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data yang relevan, penyajian data dalam narasi logis, dan penarikan kesimpulan yang mengaitkan krisis spiritualitas dengan kegagalan akuntabilitas.

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan mengonfrontasikan sudut pandang literatur teologis dan literatur akuntansi profesional. Peneliti memastikan seluruh interpretasi teologis yang dihasilkan tetap berpijak kuat pada kerangka teori akuntansi sektor publik yang berlaku. Hal ini dilakukan agar hasil analisis akhir tidak hanya kaya akan dimensi moralitas spiritual, tetapi tetap objektif, relevan, dan berkontribusi nyata bagi etika profesi akuntan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Laporan Keuangan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik

Laporan keuangan pada dasarnya disusun untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta aktivitas suatu entitas kepada pihak-pihak yang

berkepentingan. Dalam buku *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan* dijelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, membantu proses pengambilan keputusan, mengevaluasi kinerja, serta menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Dalam konteks sektor publik, tujuan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai pemilik hak atas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, laporan keuangan seharusnya menjadi sarana transparansi dan pertanggungjawaban moral atas penggunaan sumber daya publik.

Jika laporan keuangan dilandaskan atas dasar pertanggungjawaban bukan hanya kepada manusia melainkan juga kepada Yang Maha Kuasa seperti dituliskan pada Amsal 11:1 “*Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat*” pastinya tidak ada yang berani melakukan kecurangan. Dalam ayat tersebut ditegaskan “*batu timbangan yang*

tepat” yang berarti symbol kejujuran dan transparansi dalam setiap bentuk laporan keuangan.

Rendahnya spiritualitas dalam manajemen keuangan sektor publik memicu pergeseran orientasi pelaporan keuangan, dari instrumen pertanggungjawaban moral menjadi sekadar formalitas administratif. Fenomena ini menciptakan celah bagi praktik asimetri informasi dan penyajian data yang tidak faktual, yang pada akhirnya mendistorsi prinsip transparansi. Penurunan standar etika, yang ditandai dengan melemahnya integritas dan tanggung jawab moral, merupakan determinan utama yang memperlemah akuntabilitas publik dalam konteks pengelolaan sumber daya negara. Instrumen utama dalam memperkuat akuntabilitas instansi pemerintah terletak pada standarisasi pelaporan akuntansi dan pengawasan kualitas laporan keuangan secara periodik. Melalui kepatuhan terhadap pedoman akuntansi sektor publik, informasi finansial yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat transparan bagi publik. Fungsi pengawasan kemudian hadir untuk

memvalidasi akurasi dan kewajaran penyajian data tersebut. Pada akhirnya, sinergi antara standar akuntansi formal dan pengawasan sistematis, yang berlandaskan pada integritas moral dan spiritualitas, menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang akuntabel.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan dan Nilai Spiritualitas

Dalam buku *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan* dijelaskan bahwa laporan keuangan yang baik harus memiliki karakteristik kualitatif seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, netral, serta disajikan secara jujur dan lengkap. Karakteristik tersebut menjadi dasar agar informasi keuangan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban publik. Penyajian yang relevan dan andal memungkinkan masyarakat serta pihak berkepentingan memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi nyata, sehingga tercipta transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Jika dikaitkan dalam dengan Amsal 12:22 “*Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi*

orang yang berlaku setia dikenannya". Karakteristik laporan keuangan yang andal dan jujur memiliki keterkaitan erat dengan nilai spiritualitas sebagaimana dikatakan ayat tersebut mengenai pentingnya kesetiaan dan penolakan terhadap dusta.

Karakteristik penyajian yang jujur dan netral secara fundamental berkaitan dengan dimensi spiritualitas, mengingat keduanya menuntut integritas moral dari penyusun laporan keuangan. Selain kompetensi teknis akuntansi, penyajian laporan yang andal memerlukan nilai-nilai kejujuran, amanah, serta tanggung jawab etis. Defisit spiritualitas dalam praktik pelaporan keuangan dapat mengakibatkan hilangnya kualitas keandalan informasi akibat dominasi kepentingan pribadi atau golongan. Fenomena ini memicu distorsi informasi yang pada gilirannya mendegradasi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Transparansi yang tercermin melalui prinsip keterbukaan merupakan manifestasi dari akuntabilitas publik yang harus dijaga melalui pengawasan kualitas laporan keuangan secara

ketat. Validasi informasi agar sesuai dengan fakta objektif memerlukan peran aktif lembaga pengawas guna memastikan laporan tetap memenuhi standar keandalan dan relevansi. Namun, melampaui kerangka teknis dan prosedural, kualitas laporan keuangan juga sangat dipengaruhi oleh dimensi perilaku pengelolanya. Kesadaran moral dan spiritual menjadi faktor determinan yang melengkapi sistem akuntansi dalam mewujudkan pelaporan keuangan pemerintah yang tepercaya.

Konsep dan Asumsi Dasar Akuntansi dalam Perspektif Akuntabilitas Publik

Penyusunan laporan keuangan berlandaskan pada serangkaian konsep dan asumsi dasar akuntansi, yang meliputi kesatuan usaha, kesinambungan usaha (*going concern*), objektivitas, transparansi, konservatisme, serta penggunaan satuan moneter sebagai alat ukur. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kerangka acuan teknis guna memastikan bahwa informasi finansial yang disajikan memenuhi standar keterpahaman dan akuntabilitas. Dalam ranah sektor publik,

pengadopsian asumsi dasar tersebut memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Prinsip objektivitas menuntut agar setiap informasi finansial memiliki landasan bukti yang kuat dan dapat diverifikasi. Meskipun sistem formal telah memadai, kualitas objektivitas tetap rentan terhadap pengaruh subjektivitas penyusunnya apabila terjadi krisis spiritualitas atau integritas. Ketidakkampuan individu dalam menjaga tanggung jawab etis dapat mendistorsi laporan keuangan menjadi instrumen untuk mencapai tujuan personal atau kelompok tertentu. Alhasil, hal ini mengakibatkan rendahnya reliabilitas laporan dan terjadinya penyimpangan informasi dari fakta yang ada di lapangan. Dalam Amsal 16:11 *“Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan, dan segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatan-Nya”*. Ayat ini menunjukkan bahwa keakuratan pengukuran dan objektivitas merupakan prinsip yang bernilai moral

dan spiritual, sehingga relevan dengan asumsi dasar akuntansi modern.

Prinsip keterbukaan memiliki korelasi fundamental dengan akuntabilitas publik, di mana kelengkapan informasi menjadi prasyarat utama untuk menghindari kesalahpahaman bagi pemangku kepentingan. Melalui penerapan standar pelaporan yang baku, keterbukaan informasi dapat dilaksanakan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum. Peran pengawasan kualitas menjadi jaminan bahwa informasi yang disampaikan tetap transparan dan bebas dari intervensi kepentingan fragmentis. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak hanya bergantung pada kecanggihan standar dan pengawasan, tetapi juga memerlukan integrasi nilai-nilai spiritualitas untuk menjamin objektivitas dan kejujuran dalam pelaporan.

Akuntabilitas Publik sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Moral

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik

kepada masyarakat. Dalam jurnal *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan* dijelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah bentuk kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk menjelaskan serta mempertanggungjawabkan seluruh keputusan dan hasil kerjanya kepada publik. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral pemerintah dalam menjalankan amanah masyarakat. Seperti yang tertulis pada Amsal 21:3 “Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban”. Ayat ini menekankan bahwa akuntabilitas bukan hanya formalitas administratif, tetapi harus berdasarkan tindakan moral yang berlandaskan kebenaran.

Akuntabilitas publik memiliki keterkaitan fundamental dengan dimensi spiritualitas, yang mencakup nilai-nilai kejujuran, amanah, integritas, serta tanggung jawab etis. Namun, terjadinya defisit spiritualitas mengakibatkan pemaknaan akuntabilitas sering kali tereduksi menjadi sekadar kepatuhan

administratif demi memenuhi tuntutan regulasi. Fenomena ini berpotensi memicu perilaku oportunistik, seperti manipulasi pelaporan keuangan dan inefisiensi anggaran, yang berimplikasi pada rendahnya transparansi dalam manajemen keuangan sektor publik. Konsekuensinya, laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan gagal merepresentasikan realitas ekonomi secara akurat dan objektif.

Implementasi Standar Akuntansi Sektor Publik (SASP) dan efektivitas pengawasan kualitas laporan merupakan determinan krusial dalam eskalasi akuntabilitas publik. Kerangka standar pelaporan berfungsi menjamin bahwa informasi finansial memenuhi kriteria relevansi, reliabilitas, dan transparansi, sementara mekanisme pengawasan internal serta eksternal berperan dalam memvalidasi objektivitas dan akurasi data. Pencapaian akuntabilitas publik akan menjadi lebih optimal apabila instrumen teknis tersebut didasarkan pada internalisasi nilai spiritualitas dan integritas yang kokoh. Sinergi ini pada akhirnya menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kredibilitas dan

kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa lemahnya akuntabilitas public tidak hanya disebabkan oleh kelemahan sistem pengawasan dan regulasi teknis, tetapi juga berakar pada krisis spiritualitas individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan publik. Rendahnya kesadaran akan nilai-nilai moral dan tanggung jawab kepada Tuhan menyebabkan terjadinya penyimpangan seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan anggaran, dan hilangnya integritas dalam pelaporan. Oleh karena itu, permasalahan akuntabilitas pada dasarnya bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga persoalan moral dan spiritual.

Melalui perspektif Kitab Amsal, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan integritas memiliki keterkaitan erat dengan tujuan laporan keuangan dan konsep akuntabilitas publik. Ayat-ayat dalam Kitab Amsal menegaskan bahwa transparansi dan ketepatan dalam pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban moral, tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Tuhan. Dengan demikian, laporan keuangan bukan sekadar instrumen administratif, melainkan wujud penatalayanan yang harus dijalankan secara benar dan adil.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan standar akuntansi

sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan akan lebih efektif apabila disertai dengan internalisasi nilai spiritualitas dalam diri para pengelola keuangan publik. Oleh sebab itu, penguatan akuntabilitas publik perlu dilakukan melalui sinergi antara sistem pengawasan yang baik dan pembentukan karakter moral-spiritual individu.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hikmat, dan penyertaan-Nya yang senantiasa melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah yang berjudul “Krisis Spiritualitas Sebagai Akar Lemahnya Akuntabilitas Publik: Analisis Asumsi Dasar Dan Tujuan Laporan Keuangan Berdasarkan Kitab Amsal” dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan artikel ilmiah ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, khususnya Program Studi Akuntansi, yang senantiasa menyediakan lingkungan akademik yang kondusif serta memotivasi penulis untuk terus mengembangkan

pemikiran ilmiah yang integratif dan multidisipliner.

2. Bapak Nasirwan selaku dosen pembimbing sekaligus bagian dari tim penulis, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan yang penuh kesabaran, arahan yang konstruktif, serta koreksi yang berharga demi kesempurnaan artikel ini.
3. Rekan-rekan sejawat mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Medan yang telah bertukar pikiran, memberikan saran, serta dukungan semangat selama proses pencarian referensi, eksegesis teks, hingga finalisasi artikel.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi keperilakuan, etika profesi, serta penguatan akuntabilitas publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Athifah, Bayinah, A. N., & Bahri, E. S. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur pada Yayasan PPPA Daarul Qur'an Nusantara. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2(1), 54-74.
- Lase, M., Waruwu, A. T. M., & Rohy, A. R. W. (2024). Mengelola Keuangan Bisnis dengan Hikmat Alkitabiah. *TRACK: Jurnal Kepemimpinan Kristen, Teologi, dan Entrepreneurship*, 3(2), 73-89.
- Simatupang, R. D., & Gulo, R. (2024). Makna Frasa "Takut Akan Tuhan" dalam Kekristenan Modern: Perspektif dan Implementasi Berdasarkan Amsal 1:7. *Jurnal Teologi RAI*, 1(2), 231-246.
- Supriyatin. (2025). Etos Kerja Ilahi Dalam Kitab Amsal: Analisis Eksegetis Harūṣ dan 'aṣēl Untuk Etika Praktis Modern. *Jurnal Transformasi*, 4(2), 84-91.
- Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 1(1), 11-25.
- Wissang, K. O., dkk. (2021). Bahasa Figuratif sebagai Spirit Solidaritas bagi Umat dalam Kitab Amsal. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 13(1), 32-45.

Hery. 2015. *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.

Haska Wina, Intan Permata, dan Siti Khairani. “Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, dan Dishub Prov).”

Kurniawati, Arini, dan Dadang Sadeli. 2021. “Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” *Brainy* 2(2): 18–24.

